

BAB V

KESIMPULAN

Investasi asing menjadi hal yang sangat penting bagi suatu Negara ataupun daerah untuk menjalankan dan menumbuhkan perekonomiann di daerahnya. Bagi pemerintah daerah Investasi menjadi upaya pemerintah di tingkat daerah untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya. Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya

Selama ini salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanaman modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor. Era otonomi menuntut setiap pemerintah daerah (pemda) mandiri dan kreatif, mencari sumber-sumber pembiayaan, serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber

pemasukan kas daerah. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Di Daerah istimewa Yogyakarta, investasi asing menjadi salah satu hal yang penting dalam menopang perekonomian di daerah. Maka dari itu pada beberapa tahun terakhir peluang investasi terbuka lebar bagi para investor.

Investasi asing dijadikan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penopang berjalannya perekonomian daerah. Daerah istimewa Yogyakarta bukan merupakan salah satu daerah industry dan metropolitan di Indonesia, namun Daerah istimewa Yogyakarta tetap berusaha menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai macam kendala dan hambatan menjadi tantangan bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan investasi asing di daerah. Beberapa hambatan dan kendala tersebut merupakan faktor utama yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal, diantaranya :

1. Sumber daya manusia

Ketersediaan tenaga kerja tergolong cukup memenuhi berjalannya perekonomian. Namun, jumlah tenaga kerja tersebut berada pada bidang pertanian khususnya dalam bidang pertanian tradisional yang tingkat produktivitasnya tergolong rendah, dibandingkan dengan tenaga kerja yang masuk kedalam bidang

non pertanian. Padahal pada sektor industri dan jasa dibutuhkan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi.

2. Sarana dan prasarana

Meskipun ketersediaan sarana dan prasarana di Daerah Istimewa Yogyakarta telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar di daerah Yogyakarta belum memenuhi kebutuhan ataupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat.

3. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Peran serta pemerintah daerah masih tergolong rendah dalam masalah investasi, hal ini terlihat dari masih relatif rendahnya rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja

4. Pengendalian Jumlah Penduduk

Cepatnya pembangunan perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keadaan ini menimbulkan kurang terkendalinya pembangunan dan pengembangan di beberapa kawasan. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, terutama penduduk perkotaan, sekaligus mengendalikan pembangunan dan pengembangan kota.

5. Masalah Koordinasi

Belum mantapnya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan.

6. Bencana Alam

Keberadaan gunung merapi sebagai gunung teraktif di dunia memberikan ancaman yang kapan saja bisa melanda kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, bencana gempa bumi juga kapan saja bisa melanda Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya.

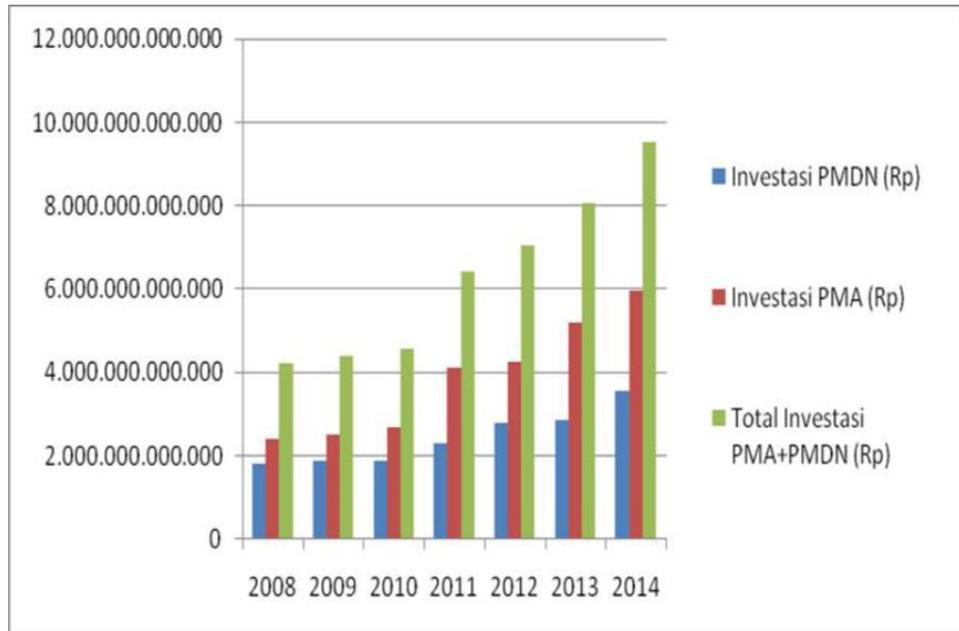
7. Masalah keamanan

Kasus pencurian, terutama kendaraan bermotor dan kasus penyalahgunaan narkoba merupakan tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Kedua kasus tersebut jumlahnya cukup besar, bahkan untuk kasus penyalahgunaan narkoba mengalami kecenderungan meningkat.

Namun, meskipun dengan berbagai hambatan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mampu meningkatkan angka investasi asing. Hal ini semakin terlihat ketika memasuki tahun 2008. Angka investasi asing menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi di bandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 5.1 Pertumbuhan Investasi Asing di

Daerah Istimewa Yogyakarta



Keberhasilan pemerintah daerah Daerah istimewa Yogyakarta merupakan kerja keras dari pemerintah di tingkat daerah yang berusaha terus meningkatkan berbagai kualitas yang mampu memberikan dorongan bagi peningkatan iklim investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan berbagai kendala dan hambatan yang menjadi masalah terdapat peningkatan investasi asing tidak menjadikan iklim investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan. Namun pada beberapa tahun terakhir justru mengalami paeningkatan yang cukup tinggi. Hal ini bisa terwujud karena adanya regulasi atau kebijakan-kebijakn yang mampu mendorong peningkatan angka investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu peran dari kepala daerah serta pemerintah daerah yang

cukup optimal juga memberikan kontribusi yang baik dalam terselenggaranya iklim investasi asing di daerah Istimewa Yogyakarta.

Keberhasilan peningkatan investasi asing dipengaruhi oleh adanya regulasi yang memberikan dukungan terhadap investasi asing. Regulasi atau kebijakan-kebijakan tersebut memberikan iklim investasi yang baik bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga memberikan daya tarik bagi para investor. Selain itu, peran dari kepala daerah serta pemerintah daerah dalam upaya peningkatan investasi asing juga sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai upaya, strategi serta rencana yang mampu memberikan dukungan terhadap terwujudnya peningkatan investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu undang-undang keistimewaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kewenangan khusus kepada kepala daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi asing.

Jika dilihat dari adanya peningkatan investasi asing yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, peningkatan angka investasi asing terjadi karena adanya faktor utama yaitu dengan adanya berbagai macam regulasi yang mendukung investasi asing di daerah. Peningkatan angka investasi asing yang dimulai ketika memasuki tahun 2008 didukung oleh adanya berbagai regulasi di tingkat daerah. Diantaranya adalah dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana pada Badan kerjasama dan Penanaman Modal. Pembentukan badan ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dalam memberi pelayanan

dan kepastian berusaha bagi investor. Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kerjasama dan menanam modal. Dalam memenuhi kebutuhan dan perkembangan penanaman modal, peraturan ini beberapa kali perubahan. Yaitu dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Kemudian diubah kembali dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal.

Disamping peraturan tersebut terdapat pula Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013. Dengan salah satu misi yang menitik beratkan pada bidang ekonomi menjadikan pemerintah di tingkat daerah berusaha untuk lebih meningkatkan potensi-potensi ekonomi yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Badan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lebih mendorong peran dari badan-badan di tingkat kabupaten yang bertugas menangani masalah kerjasama dan penanaman modal untuk lebih mengoptimalkan pelayanan guna lebih meningkatkan angka investasi asing di tingkat kabupaten atau kota. Selain itu berdasarkan misi yang tertuang dalam peraturan tersebut dibutuhkan

dukungan penanaman modal khususnya penanaman modal Non Pemerintah atau swasta sangat diperlukan. Untuk itu, rencana pembangunan daerah tersebut secara tidak langsung membawa peluang bagi para investor untuk berinvestasi di Yogyakarta. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi jembatan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian dengan adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2014 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017, yang merupakan uraian dari Rencana Strategis pelaksanaan arah kebijakan Pemerintah Daerah selama kurun 5 tahun Dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, prioritas pembangunan yang disasarkan oleh Badan Kerjasama Penanaman Modal DIY adalah pada misi kedua yakni Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia sebagai badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan BKPM Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat nasional, telah menetapkan visinya yaitu Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Indonesia. sesuai dengan visi yang telah ditetapkan tersebut,

Selain regulasi atau kebijakan tersebut, terdapat pula Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 adalah peraturan daerah

yang, membahas tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Pemberian insentif merupakan dukungan pemerintah terhadap penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, Sedangkan kemudahan dimaksud adalah peran pemerintah dalam menciptakan infrastruktur yang baik guna mendukung itu. Selain itu, yang terpenting dari adanya peraturan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong meningkatnya investasi, mendorong pengembangan kawasan industri dan lainnya.

Peran actor ditingkat pemerintah daerah juga merupakan salah satu factor pendukung utama dalam terwujudnya peningkatan angka investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Keistimewaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan tersendiri bagi kepala daerah untuk mendukung investasi asing di Daerah istimewa Yogyakarta. Kepala Daerah atau gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mampu melahirkan kebijakan yang mampu memberikan dukungan terhadap investasi asing. Namun kebijakan tersebut tetap harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam era otonomi daerah, peran serta kepala daerah dan pemerintah daerah juga memberikan efek positif terhadap peningkatan investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya era otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya undang-undang otonomi daerah menjadikan kepala daerah dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya demi kemajuan pembangunan. Atas dasar tersebut menjadikan wewenang kepala daerah

dan pemerintah daerah menjadi lebih tinggi. Namun kewenangan tersebut harus tetap sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya peningkatan investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta yang di dukung dengan adanya regulasi yang mendukung investasi asing serta adanya peran serta pemerintah di tingkat daerah, menjadi bukti bahwa kendala dan hambatan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peningkatan investasi asing bisa di atasi. Ini menjadi salah satu penemuan baru, bahwa peningkatan investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta tercapai karena adanya regulasi yang mendukung investasi asing serta peran pemerintah di daerah yang sangat optimal. Pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di beberapa daerah, ditemukan bahwa dukungan infrastruktur atau sarana dan prasarana sebagai pendukung investasi asing di daerah. Selain itu terdapat pula bahwa tata letak daerah yang strategis juga menjadi factor pendukung investasi asing di daerah.

Namun, bagi daerah Istimewa Yogyakarta dengan keterbatasan infrastruktur atau sarana dan prasarana serta letak geografis yang tidak terlalu strategis, tidak menjadikan angka investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengalami peningkatan. dengan adanya regulasi serta peran pemerintah di daerah justru mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan angka investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga, dengan demikian bahwa selain masalah infrastruktur atau sarana dan prasarana serta letak geografis suatu daerah, regulasi dan peran serta pemerintah daerah merupakan faktor utama dalam upaya mewujudkan peningkatan investasi asing di daerah.